

## **KONFRONTASI ISLAM IDEOLOGIS VERSI ABDUL QAHHAR MUZAKKAR DENGAN KOMUNIS DI DESA TOMPO BULU**

<sup>1</sup>Abdul Kahar, <sup>2</sup>Syamzan Syukur, <sup>2</sup>Hasaruddin

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>1</sup>[Akahar981@gmail.com](mailto:Akahar981@gmail.com), <sup>2</sup>[zansyukur@yahoo.com](mailto:zansyukur@yahoo.com), <sup>3</sup>[Hasruddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:Hasruddin@uin-alauddin.ac.id)

### ***Abstract***

Abdul Qahhar Mudzakkar is one of the figures who has now become a symbol of struggle for some people in South Sulawesi. His struggle in voicing the rights of the guerrillas gave a distinct impression to the local people who were struggling at that time. Not only that, Qahhar has also become an icon of struggle for religious leaders in fighting for Islamic law. Conflict within the military is considered the basis for the rebellion of Qahhar and his troops. Yet if we examine it from another perspective, Qahhar's struggle is not motivated by political motives; but a religious motive. We can see this from the various kinds of reconciliation carried out by government figures, but none of them have been successful. In addition, the letters written by Qahhar really show his rejection of the communists who have had a special place in this country. We can see the same thing in the village of Tompo Bulu, which is one of the headquarters for the guerrillas to gather. At that time, when the PKI came to seek support, the local community refused on the grounds that it was the PKI. That is, the people in the interior have been educated so that they reject anything that smells of PKI in their lives.

**Keywords:** Qahhar Mudzakkar, guerrillas, PKI

### **Abstrak**

Abdul Qahhar Mudzakkar merupakan salah satu tokoh yang kini menjadi simbol perjuangan bagi sebagian masyarakat di Sulawesi Selatan. Perjuangannya dalam menyuarkan hak-hak para gerilyawan memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat local yang berjuang saat itu. Tidak hanya itu, Qahhar juga menjadi ikon perjuangan bagi para tokoh agama dalam memperjuangkan syariat Islam. Konflik di tubuh militer dianggap sebagai dasar pemberontakan Qahhar bersama para pasukannya. Padahal jika kita menelaah dari perspektif lain, perjuangan Qahhar tidaklah dilatarbelakangi oleh motif politik; melainkan motif agama. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai macam rekonsiliasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemerintahan namun tak satupun yang berhasil. Ditambah lagi, surat-surat yang ditulis oleh Qahhar benar-benar menampakkan penolakannya terhadap komunis yang telah mendapat ruang khusus di negeri ini. Hal serupa dapat kita lihat di desa Tompo Bulu yang menjadi salah satu markas

berkumpulnya para gerilyawan. Saat itu, ketika PKI datang untuk mencari dukungan, masyarakat lokal menolak dengan alasan PKI-nya. Artinya, masyarakat di pedalaman telah tereduksi sehingga mereka menolak apapun yang berbau PKI dalam kehidupannya.

**Kata Kunci:** Qahhar Mudzakkar, Gerilyawan, PKI

## **Pendahuluan**

Abdul Qahhar Muzakkar merupakan salah satu tokoh yang sangat fenomenal dan kontroversial. Namanya dianggap pejuang oleh sebagian, juga dianggap pemberontak oleh sebagian. Hingga hari ini, isu-isu tentang Qahhar masih sangat hangat dibicarakan; baik dari perspektif sejarah perjuangan dan pemberontakannya hingga pada aspek mitos lewat cerita-cerita pengikutnya.

Qahhar tidak lagi menjadi tokoh biasa, lewat pengikut-pengikutnya, ia dianggap sebagai seorang khalifah kaum muslimin. Qahhar menjadi penting setelah pemberontakan yang dilakukan dan sikapnya yang sangat keras terhadap komunis.

Qahhar dipandang sebagai representasi kelompok yang terzalimi pasca kebijakan penyeleksian untuk bergabung ke tubuh TNI. Sebagian besar penulis memandang bahwa Qahhar bersama pasukannya melakukan gerilyanya karena kekecewannya terhadap keputusan atas syarat-syarat seleksi untuk bergabung menjadi TNI. Syarat yang menjadi perdebatan di Mabes AD terkait penerimaan anggota tantara nasional adalah tidak buta huruf. Hal ini tentu bertentangan dengan kondisi gerilyawan kemerdekaan di Sulawesi, termasuk pasukan Qahhar Muzakkar ataupun yang tergabung di bawah komando Andi Selle.<sup>1</sup>

Namun, ada hal lain yang menjadi pertanyaan besar, bukankah pada 1950 ketika pemerintahan Masyumi di bawah komando Natsir telah memberi perhatian khusus bagi para gerilyawan di Sulawesi lalu membuat kebijakan baru untuk menerima pasukan gerilyawan ke dalam tubuh TNI? Jika sudah diterima, mengapa pemberontakan tetap dilangsungkan. Itulah yang menjadi salah satu pembahasan dalam tulisan ini.

---

<sup>1</sup>Sainal Abidin, *Andi Selle Dalam Pergolakan Bersenjata Di Sulawesi Selatan 1950-1964*, (Yupa: Historical Studies Journal, 1 (1), 2017), h. 29

Kedua, keputusan untuk menjadikan Islam sebagai tujuan adalah bentuk kesepakatan para tokoh yang ada di Sulawesi. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa di Baraka yang membuat Qahhar Muzakkar diculik. Selaku Panglima di wilayah KGSS Enrekang Andi Sose menculik lalu membawa Abdul Qahhar Muzakkar ke Baraka. Di Baraka Qahhar Muzakkar, dilindungi dengan baik oleh Andi Sose sebab Baraka merupakan daerah operasinya. Dalam kenyataan sesungguhnya, dia diculik KGSS, atas inisiasi Andi Sose, walaupun mungkin sekali Andi Sose bertindak demikian berdasarkan perintah atau setidak-tidaknya dengan persetujuan Qahhar Muzakkar diam-diam. (Van Dijk, 1983). Peristiwa penculikan inilah yang menjadikan perjuangan pasukan Qahhar tidak hanya dipicu oleh konflik militer tapi konflik ideologi, khususnya PKI yang mendapatkan ruang khusus di era pemerintahan Ir. Soekarno. Konflik ideologi tersebut tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga terjadi di tingkat desa seperti di Tompo Bulu. Karena perjuangan ideologi dari segala tempat memang akan selalu ada – sebab ideologi sesungguhnya tak pernah mati, apalagi ia bersumber pada ajaran agama- agama klasik seperti Islam.<sup>2</sup>

### **Biografi Abdul Qahhar Mudzakkar**

Qahhar lahir di Luwu, Sulawesi Selatan. Tepatnya di Dusun Lanipa pada hari Kamis 13 Rajab 1339 H yang bertepatan dengan tanggal 24 Maret 1921 M. Ia merupakan anak yang lahir dari keluarga pedagang yang termasuk dalam strata *to-maradeka* di Luwu.<sup>3</sup> Qahhar adalah salah seorang kader Muhammadiyah. Pendidikan Ke-Muhammadiyahannya dimulai pasca pendidikan dasarnya di Lanipa. Qahhar menempuh Pendidikan di Standar School Muhammadiyah Palopo lalu hijrah ke Solo untuk belajar di Sekolah Guru Mu'allimin Muhammadiyah. Dari Sekolah Guru di Mu'allimin inilah Qahhar terhubung dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah hingga kelak menjadi salah satu pemimpin di Hizbul Wathan (Gerakan Pandu Muhammadiyah) di masanya.

---

<sup>2</sup>Alchaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M Kartosuwiryo*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), h. 15.

<sup>3</sup>Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar : dari patriot hingga pemberontak*, (Jakarta: Grasindo, 1992), h. 98.

Qahhar adalah salah seorang yang sangat getol menentang sistem feodalisme di Luwu. Haryanto menyebutkan bahwa “salah satu peristiwa penting dalam perjalanan hidup Qahhar adalah penjatuhan hukum adat Kerajaan Luwu pada 1943. Ia dijatuhi hukuman *ri-paoppangi tana* (secara harfiah berarti “ditelungkupkan tanah”), yang berarti tidak boleh menginjak Luwu atau diusirdari tanah Luwu.<sup>4</sup>” Menurut Anhar Gonggong, satu di antara sebab yang menyebabkan Qahhar mendapatkan hukuman ini adalah penghinaan terhadap bangsawan Luwu yang masih merawat sistem feodalisme di tanah Luwu.

Peristiwa pengusiran tersebut merupakan bagian penting dalam perjalanan hidup Qahhar. Karena pengusiran tersebutlah yang menjadi alasan Qahhar mesti pindah dan menjalani hidupnya di tanah Jawa. Syafaruddin menyebutkan bahwa Qahhar Muzakkar kembali ke Surakarta pada tahun 1943. Di Surakarta ia memulai hidup baru. Ia bersama istrinya membuka sebuah perusahaan yang diberinama Semangat Muda. Setelahnya, ia menjadikan Jawa sebagai basis perjuangan awal dan tempat tinggalnya.<sup>5</sup>

Kehidupan Qahhar di Jawa inilah yang mempertemukan dirinya dengan berbagai tokoh revolusi kemerdekaan hingga ikut terlibat di dalamnya. Qahhar Muzakkar juga aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan sebagai salah seorang barisan pengawal ketika Soekarno menyampaikan salah satu pidato rapat umumnya di lapangan Merdeka di Jakarta, 19 September 1945.<sup>6</sup>

Kultur kehidupan Qahhar bersama dengan para tokoh-tokoh revolusi yang ada di Jawa memberikan jalan tersendiri bagi kehidupannya. Selain aktif dalam berinteraksi dengan para tokoh revolusioner, Qahhar juga terlibat aktif dalam pembentukan KRIS (Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi) sebagai organisasi politik dan militer. Di samping itu, ia juga sudah membentuk kesatuan

---

<sup>4</sup>Haryanto, *Klanisasi Demokrasi, Politik Klan Qahhar Mudzakkar Di Sulawesi Selatan*, (Cet. I; Yogyakarta: PolGov, 2014), h. 78

<sup>5</sup>Syafaruddin Usman, *Tragedi Patriot Dan Pemberontak Kahar Muzakkar*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), h. 13.

<sup>6</sup>*Ibid.*

bersenjataanya sendiri, BKI (Barisan Kemajuan Indonesia), yang terdiri dari tahanan Nusakambangan.

Pada 21 september 1945 rombongan pertama pasukan Australia tiba di Makassar. Mereka ditugasi untuk mengambil alih tanggung jawab sementara atas Kalimantan dan Indonesia Timur. Salah satu tugas yang mereka prioritaskan adalah membebaskan 460 tawanan perang yang kebanyakan berkewarganegaraan Inggris. Kedatangan tersebut menjadi polemik tersendiri yang bakal menjadi cikal bakal konflik antara sekutu dan Belanda dengan warga lokal pro-Republik.

Beberapa orang pejabat lama yang sebagian besar di antaranya adalah kelompok minoritas Kristen, nampak menyambut baik orang-orang Belanda. Terlebih lagi banyak yang memandang bahwa mereka malah mempermudah usaha Belanda untuk mengambil alih kantor-kantor milik pemerintah di kota itu. Dr. Ratulangi bersikap hati-hati. Tetapi para pemuda, dan banyak penduduk di pedalaman, sangat menentang kembalinya Belanda sehingga terjadi sejumlah Insiden.<sup>7</sup> Insiden tersebut tidak selesai sampai di situ, bahkan bakal berbuntut dan berimplikasi pada pecahnya NICA dengan masyarakat local pro-Republik.

Para pejabat NICA sangat mengkhawatirkan aktivitas yang dilakukan oleh Andi Mappanjukki selaku raja Bone. Karena di antara banyak raja-raja lokal, Andi Mappanjukki-lah yang memiliki pengaruh besar kepada raja-raja lokal lainnya. Andi Mappanjukki juga mempengaruhi Andi Djemma selaku datuk Luwu karena saat itu pemuda Luwu juga mendesak agar datuk Luwu segera mengambil sikap pro-Republik (Harvey, 1989: 115).

Akhirnya Andi Mappanjukki mengadakan pertemuan di rumahnya, di Jongayya, bersama para penguasa utama Sulawesi Selatan dan menghasilkan keputusan terhadap dukungan kepada Republik Indonesia dengan mengangkat Dr. Ratulangi sebagai gubernurnya. Keputusan itu disampaikan kepada Dougherty sebagai komandan pasukan Australia dan Mayor Wegner sebagai perwira kepala NICA. Pasca keputusan tersebut, lewat desakan para pejabat NICA maka pada tanggal 20 Oktober Brigader Chilton mengirim beberapa batalyon guna

---

<sup>7</sup>Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 113.

menduduki wilayah-wilayah terpenting di Bone dan Bonthain (Bantaeng) dan memerintahkan pasukannya membantu para pejabat NICA dalam memerintah wilayah-wilayah tersebut.

Pada tanggal 1 Desember dengan tegas NICA memberikan instruksi kepada penguasa-penguasa Sulawesi untuk menaati pemerintahan NICA. Hanya saja, beberapa penguasa lebih memilih meletakkan jabatannya ketimbang menerima tawaran Kerjasama NICA. Karena sangat mustahil bagi para pejabat pro-Republik yang bekerjasama dengan NICA, Australia, tanpa bekerjasama dengan kolonial Belanda; sehingga dipandang untuk menghindari tawaran dalam rangka menjaga solidaritas masyarakat lokal yang pro-Republik.

Setelah kegagalan pendudukan yang ada di Makassar akhirnya berpindah ke wilayah lain. Ternyata di wilayah lain luar Makassar juga sudah mengambil sikap pro-Republik lebih dahulu. Di daerah Pare-pare Andi Makassau mendirikan PKR. Di Luwu, setelah pengaruh Andi Mappanjukki ditambah desakan para pemuda, Andi Djemma memilih sikap juga untuk pro pada Republik.

Pasukan-pasukan NICA (Nederlands-Indie Civiele Administratie) atau pemerintah sipil Hindia Belanda dan KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger) atau tentara kerajaan Hindia Belanda tiba di Luwu pada bulan Oktober 1945 namun pertempuran baru dimulai sejak Januari 1946, setelah pasukan KNIL memasuki sebuah masjid dekat Palopo, lalu menendang seorang penjaga dan merusakkan satu Qur'an.<sup>8</sup> Pasca insiden tersebut, datuk Luwu memberikan ultimatum agar KNIL masuk ke dalam barak dalam jangka 48 jam. Hanya saja ultimatum tersebut tidak diindahkan sehingga mengakibatkan terjadinya pertempuran sengit di Palopo.

Kondisi pertempuran yang semakin sengit di Sulawesi Selatan menjadi isu yang tak bisa dibiarkan di tengah negara yang baru saja diproklamkan kemerdekaannya. Sehingga beberapa delegasi pemuda dari Sulawesi berangkat ke tanah Jawa untuk meminta bantuan khusus ke pemerintah pusat. Salah satu delegasi bertemu dengan Presiden Soekarno, Perdana Menteri Sjahrir, dan

---

<sup>8</sup>Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 120.

Panglima Besar Soedirman di Jogjakarta pada 12 Januari 1946. Akhirnya, Perdana Menteri Sjahrir memberikan satu perangkat radio pengirim-penerima dan Panglima Soedirman menjanjikan beberapa senjata dan surat kuasa kepada Andi Matalatta untuk membentuk divisi TRI di Sulawesi.

Setelah kedua pemuda tersebut diberikan tugas akhirnya keduanya mencari rekan yang bisa diajak bersama untuk merealisasikan mandat tersebut. Mereka lalu mendapati bahwa satu-satunya yang bisa dijadikan sebagai penguat adalah BKI-nya Qahhar Muzakkar. Dan sebagai seorang yang menguasai pasukan, maka Qahhar dijanji untuk memegang satuan komando baru. Pada tanggal 24 April 1946 TRI-Persiapan Sulawesi resmi dibentuk. Qahhar komandannya; wakilnya dengan tanggung jawab melatih pasukan untuk dikirim ke Sulawesi adalah Andi Matalatta. Saleh Lahade, kepala stafnya, bersama Qahhar tetap tinggal di markas pusat Jogja. Latihan untuk perwira dilakukan di Solo, dan untuk prajurit di dekat Jember, di Jawa Timur (Harvey, 1989: 141).

Meski demikian, karir Qahhar di dunia kemiliteran tidaklah lama. Setelah sekian lama ia juga terlibat di dalam aktivitas revolusi dalam mengusir penjajah dengan ikut langsung bergerilya dan dengan mempersiapkan pasukan yang benar-benar siap mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

Perlu dipahami bahwa inti dari terbentuknya TRI-PS yang bergerilya di Sulawesi adalah BKI hasil bentukan Qahhar. Mayoritas keanggotaan TRI-PS berasal dari dua latar belakang: pertama adalah narapidana yang dibebaskan dari tahanan Nusakambangan; selain tahanan politik, mereka juga rata-rata adalah bekas bandit, penjahat, pencuri, atau pembunuh yang sangat lihai dalam bertempur tanpa pernah takut mati dengan latar belakang pendidikan yang sangat minim; mereka rata-rata buta huruf dan tidak bisa membaca. Kelompok kedua adalah kelompok pelajar dan pemuda yang punya basic pendidikan yang bagus karena pernah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah Belanda.

Setelah bulan-bulan awal kemerdekaan Sulawesi, tahanan politik sedikit demi sedikit mulai dibebaskan. Di Sulawesi Selatan, pelepasan ini kira-kira dimulai pada 20 Desember 1949. Namun, ada dinamika baru yang dihadapi oleh

pemerintah pusat pasca kemerdekaan dan pelepasan tersebut; yakni, permintaan para mantan gerilyawan untuk diterima di dalam tubuh militer.

Pada awal-awal tahun 1950, sebuah konferensi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pejuang bersama para batalyon-batalyon yang terhimpun di bawah naungan Kesatuan Gerilja Sulawesi Selatan (KGSS) diadakan di Maros. Mereka meminta agar diakui sebagai TNI Divisi Hasanuddin di bawah komando Letnan Kolonel Abdul Qahhar Muzakkar. Mereka beranggapan bahwa itu adalah hal yang sangat wajar; pertama karena mereka merasa telah diakui sebelum itu melalui pelantikan yang dilaksanakan di Patjekke pada Januari 1947 atas perintah Panglima Besar Sudirman, atau lebih dikenal sebagai satuan TRI-PS oleh Andi Mattalatta dan Saleh Lahade. Kedua karena penderitaan dan perjuangan yang mereka rasakan selama revolusi juga menjadi alasan terkuat atas keberhakannya dalam menerima pengakuan tersebut; apalagi, tantangan revolusi yang ada di Sulawesi jauh lebih dahsyat ketimbang yang ada di Jawa.

Usulan tersebut sudah disampaikan ke Komisi Militer. Hanya saja Komisi Militer telanjur menerima perintah untuk melakukan seleksi terhadap gerilyawan yang akan digabungkan ke dalam satuan TNI/APRIS. Beberapa syarat yang menjadi kriteria seleksi adalah: 1. Standar Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kesegaran jasmani, dsb. (Harvey, 1989: 162).

Aturan tersebut menjadi persoalan tersendiri bagi gerilyawan yang benar-benar mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan namun belum pernah mengenyam pendidikan formal, sehingga jelas mereka akan kesulitan memenuhi syarat; atau minimal mendapatkan pangkat rendah yang jelas tidak sepadan dengan perjuangan mereka di masa revolusi. Hal ini tambah memuncak lalu mengakibatkan peristiwa tembak menembak setelah diterimanya pasukan KNIL yang jelas-jelas bentukan Belanda pada 30 Maret 1950 sementara permintaan para gerilyawan sama sekali belum dipenuhi.

Kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap tidak berpihak bagi para gerilyawan. Ditambah pengetahuan dari para pemimpin KGSS bahwa syarat ini hanya dimaksudkan untuk meminimalisir jumlah pasukan yang ada dalam tubuh TNI. Pembicaraan mengenai standar bagi mereka adalah

tampak sebagai kemunafikan belaka; mereka tahu betul bahwa banyak para gerilyawan yang tidak memenuhi syarat mengenai pendidikan atau kemampuan membaca menulis mereka.<sup>9</sup> Apalagi ditambah pertanyaan dari para gerilyawan bahwa mengapa di Jawa ada 3 divisi yang dimiliki oleh TNI sedang di Sulawesi satu pun tak ada.

Bagi Kawilarang, gerilyawan adalah petualang dan pembuat kerusuhan; orang-orang yang hanya berpikir mengenai dirinya sendiri dan daerahnya sendiri. Mereka tidak memiliki senjata dan mereka lari dari pertempuran. Sehingga mereka tak dapat dianggap sebagai prajurit.

Bagi para gerilyawan yang tidak memiliki persenjataan yang mapan lari dari pertempuran adalah siasat yang baik. Mereka tak punya latihan militer samasekali; satu-satunya latihan militer mereka adalah pengalaman praktis dalam peperangan gerilya. Sangat sedikit di antara mereka yang bepergian keluar daerah. Bahkan banyak yang tidak berbahasa Indonesia. Anggaran dan perjanjian di luar pengetahuan mereka, tetapi penjara dan kematian telah mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Gerilyawan menyadari bahwa Kawilarang tidak akan dapat memahami bagaimana perasaan mereka. Banyak yang meminta agar Qahhar yang mengerti mereka hanya saja Qahhar mengalami nasib yang sama.

Pada 18 atau 22 Juni, Qahhar diutus oleh Bambang Supeno untuk berangkat ke Sulawesi dalam rangka menemui para gerilyawan. Sebenarnya Qahhar sudah dilarang oleh Kawilarang untuk berangkat kecuali dengan syarat ia akan mengatakan bahwa dirinya bukan lagi komandan bagi mereka. Hanya saja, Bambang Supeno sudah abai dengan syarat dan larangan tersebut. Sehingga Kawilarang menganggap bahwa Qahhar adalah seorang bajingan yang tidak berdisiplin.

Ketika tiba di Makassar, Qahhar yang didampingi oleh Letnan Kolonel Mursito selaku wakil dari Bambang Supeno sempat bertemu dengan Kawilarang sebelum menemui pasukan KGSS di hutan. Hanya, itu sebentar saja. Qahhar lalu melanjutkan perjalanannya ke hutan untuk bertemu dengan para gerilyawan. Dalam

---

<sup>9</sup>Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 173.

pertemuan dengan para gerilayawan yang kekecewannya juga ia rasakan, Qahhar memberi jaminan bahwa status mereka akan diselesaikan sesuai dengan perintah Jendral Soedirman tahun 1946 yang menyetujui pembentukan satuan Tri di Sulawesi.

Pada tanggal 1 Juli 1950, Qahhar dengan Kawilarang bertemu untuk membahas kaum gerilyawan. Ia mengajukan permohonan mereka agar dijadikan sebagai Brigade atau Resimen Hasanuddin lalu ia sendiri diangkat sebagai komandan sebagaimana permintaan para gerilyawan. Permohonan tersebut akhirnya tetap ditolak, lalu Qahhar mengakhiri statusnya dan memutuskan hubungannya dengan TNI serta menanggalkan tanda-tanda pangkatnya dan melemparkannya ke atas meja di depan Kawilarang. Setelah pertemuan itu Kawilarang lalu mengeluarkan keputusan untuk membubarkan KGSS dan organisasi militer lain selain APRIS. Malam itu Qahhar diculik oleh salah seorang pemimpin Gerilya dan dibawa ke Baraka, dekat Enrekang.

Kajian tentang Abdul Qahhar Muzakkar tidak bisa dipisahkan dari wilayah Baraka sebab Baraka adalah basis pertahanan pertamanya. Baraka sebagai ibu kota kecamatan di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang merupakan daerah yang sangat menjadi pusat pertahanan DI/TII yang bergerilya di hutan karena kondisi geografis Baraka yang berada di pegunungan dan sulit untuk dijangkau. Hal itulah yang menjadi alasan pertama. Selain itu, dengan bantuan pasukan bawahan Qahhar Muzakkar yang menjadi agen politiknya di Baraka, keinginan untuk mendirikan negara Islam akan mudah terwujud. (Sitonda, 2014).

Di samping itu, warga di Baraka telah lebih dahulu mengenal Islam sehingga faktor keamanan dan dukungan masyarakat yang sebelumnya memang telah mengenal Islam juga menjadi alasan Baraka menjadi markas DI/TII di Sulawesi Selatan berlangsung selama bertahun-tahun.<sup>10</sup> Basis pertahanan dan perekrutan yang dimulai di wilayah Baraka ini adalah titik start yang nanti membawa basis Qahhar sampai ke wilayah Pangkajene, khususnya di Tompo Bulu.

<sup>10</sup>Nur Aisyah, Patahuddin, H.M Rasyid Ridha, *Baraka: Basis Pertahanan DI/TII Di Sulawesi Selatan (1953-1956)*, (Jurnal Pattingngalloang: Pemikiran Dan Penelitian Dan Pendidikan Kesejarahan, Vol 5 No 21 April-Juni, 2018), h. 52

### **Musyawarah Penentuan**

Peristiwa Baraka ini adalah peristiwa yang sangat menentukan arah dari sejarah panjang perjuangan Qahhar dan para gerilyawan. Musyawarah yang memutuskan arah pergerakan pasca penolakan Jendral Kawilarang terhadap para gerilyawan ke tubuh TNI karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Secara umum dan memang tidak bisa kita mungkiri bahwa penolakan jendral Kawilarang terhadap diterimanya gerilyawan ke dalam tubuh militer adalah pemicu awal terjadinya pemberontakan pasca kemerdekaan yang ada di Sulawesi. Karena sebagaimana di banyak sumber tertulis disebutkan bahwa pasca kejadian tersebut maka pada 7 Agustus 1953 Qahhar mendeklarasikan Sulawesi menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwirjo (Tangke: 2009) Meski demikian, penolakan tersebut bukanlah pemicu utama, akan tetapi hanya sebagai titik start awal saja. Karena beberapa hari setelah penolakan tersebut, pemerintah pusat menyikapi dan menaruh perhatian lebih kepada para gerilyawan. Tepat pada 13 November 1950, pada masa pemerintahan Masyumi, dalam hal ini Mohammed Natsir mengeluarkan keputusan baru terkait para gerilyawan untuk diterima menjadi TNI.

Keputusan itu tidak membuat Qahhar puas dan berhenti melangsungkan gerilyanya. Karena sejatinya, tuntutan utama yang diinginkan oleh Qahhar adalah menjadikan negara ini sebagai negara yang beragama. Bahkan, secara umum Qahhar bergerilya dengan perjuangan bersenjata karena dipandang bahwa itu adalah sarana paling efektif untuk menghasilkan Indonesia yang tidak hanya terbebas dari penjajah, melainkan juga Islami.<sup>11</sup> Hal ini sangat jelas kita temukan di banyak surat-surat yang ia tuliskan kepada Soekarno dan kepada Zulkifli Lubis. Di banyak tulisannya ia meminta agar Sukarno ikut serta menghentikan Gerakan komunis yang mulai bergerak dari bawah; sementara Gerakan komunis ini adalah Gerakan yang sangat anti terhadap Islam.

Perjuangan Qahhar bersama para pasukannya dengan menjadikan Islam sebagai cita-cita perjuangannya sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh

---

<sup>11</sup>Abu Bakar, *Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar*, (Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol 8 No 1, April 2018), h. 61

Hasan Kamal bahwa ketika Qahhar diculik, lalu dibawa ke Baraka, di sanalah pembahasan yang membahas tentang arah dan haluan perjuangan para pejuang. Dan keputusan dalam kegiatan itu adalah menjadikan Islam sebagai arah perjuangan dan cita-cita.<sup>12</sup> Gerakan Qahhar juga mendapat dukungan dari ulama. Salah satu ulama yang masyhur memberikan dukungan pada gerakan QahharMudzakkar adalah Haji Abdul Rahman Ambo Dalle yang memiliki lembaga pendidikan Darul Da'watul Irsyad (DDI) yang tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan.<sup>13</sup>

Dasar Islam dalam perjuangan Qahhar menjadi landasan utama yang membuat dia dan kelompunya untuk mendiskreditkan PKI. Dalam bukunya, Qahhar menulis: Khrushchev, induk semang komunisme bertegas mengatakan “kita tegas atheis”. DN. Aidit, anak kandung komunisme di Indonesia, bertegas mengatakan “kita atheis, semua partai tidak bertuhan” dan tuhan berkata tegas pula dalam kitab suci al-Qur'an surah al-Anfal ayat 55 “sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tak beriman.”<sup>14</sup>

Di akhir kalimatnya dalam surat yang dikirimkan ke Zulkifli Lubis, Qahhar juga mengatakan bahwa siap sedia kembali hidup dan berbakti di tengah-tengah masyarakat ramai Indonesia kecintaan kita semua, akan tetapi terlebih dahulu saya meminta jaminan adanya ketentraman dan kebahagiaan hidup bangsa Indonesia secara khusus dan masyarakat dunia secara umum.<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan ketentraman oleh Qahhar pada kalimat di atas memuat dua poin: falsafah negara (Pancasila) supaya segera didekritkan diganti dengan falsafah ketuhanan, bunyi lengkapnya adalah “ajaran Islam dan ajaran agama dianut oleh segenap golongan suku bangsa Indonesia”. 2. Supaya pimpinan

---

<sup>12</sup>Hasan Kamal, Anak tertua Qahhar Muzakkar dari istrinya Corry (anak tertua yang pernah melihat langsung dan hidup di tengah hutan bersama para gerilyawan), *Wawancara*, Hotel Lopi Makassar, 21 November 2021.

<sup>13</sup>Nurul Azizah, *Islamisme: Ideologi Gerakan Kahar Mudzakkar Di Sulawesi Selatan 1952-1965*, (Jurnal Penelitian Keislaman, Vol 15 No 2, 2019, h. 99

<sup>14</sup>Abdul Qahhar Mudzakkar, *Revolusi Ketatanegaraan Indonesia Menuju Persaudaraan Manusia*, (Cet. I; Makassar: Tim Qahhar Mudzakkar Center, 2020), h. 7.

<sup>15</sup>*Ibid*

negara menggariskan dan mendekritkan program politik negara yang tegas anti komunis, melenyapkan komunis di Indonesia.

Kalimat serupa juga ditulis dalam surat yang dikirim ke Soekarno. Qahhar mengatakan “dalam surat saya kepada Soekarno, saya usulkan kepadanya supaya komunis didekritkan untuk ditiadakan, dilenyapkan di Indonesia, demi untuk menjamin ketentraman hidup dan kerukunan bangsa kita. Adalah wajar, benar, dan adil, bahwa komunis menolak ajaran komunis anti tuhan, dan karena itu kita bangsa Indonesia sebagai bangsa beragama wajib pula bertegas menolakkomunisme.

Keterangan-keterangan tertulis tersebut mengisyaratkan bagaimana sikap Qahhar terhadap PKI yang terus berkembang dari hari ke hari. Sikap Qahhar yang anti-PKI dipengaruhi tentu sejalan dengan pemahaman Islam yang dimilikinya; ditambah lagi – menurut Hasan Kamal – pertemuan di Baraka yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam mengamanahkan bahwa perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan adalah perjuangan Islam.

### **Konfrontasi Pasukan Qahhar dengan PKI di Desa Tompo Bulu**

Pada kisaran tahun 1950–1962, Sulawesi Selatan memiliki dua peristiwa politik yang sangat penting dan menonjol serta memiliki dampak luas pada berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial, masyarakat di Sulawesi Selatan. *Pertama*, Gerakan DI/TII Qahhar Muzakkar (1950-1962), dan *kedua*, Gerakan Permesta yang dipelopori oleh perwira militer di Sulawesi Selatan (1957-1962).<sup>16</sup>

Kedua gerakan ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, khususnya pada ideologi gerakan yang dijadikan sebagai landasan perjuangan. Gerakan DI/TII Qahhar Muzakkar berideologi Islam sedangkan gerakan Permesta hanya menawarkan gagasan otonomi tanpa ada pengaruh ideologi di dalam pemikiran anggotanya. Meski demikian, baik gerakan DI/TII maupun Permesta keduanya

---

<sup>16</sup>Taufik Ahmad, *Mengail Di Air Keruh: Gerakan PKI Di Sulawesi Selatan 1950-1965*, (Jurnal Patanjala, Vol 6 No 2, 2014), h. 304

memiliki kesamaan visi yaitu menghilangkan pengaruh komunis di Sulawesi Selatan.<sup>17</sup>

Perjuangan gerilya Qahhar berlangsung di hampir seluruh hutan yang ada di Sulawesi. Qahhar melancarkan aksinya di hutan-hutan lalu menyebar ke banyak tempat dan wilayah di Sulawesi Selatan akhirnya sampai ke Desa Tompo Bulu. Desa Tompo Bulu adalah satu-satunya desa yang berada di kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.<sup>18</sup>

Tompo Bulu yang terletak di kaki 'Bulu' Saraung' Pangkep adalah salah satu markas tempat berkumpulnya gerilyawan Qahhar dari berbagai daerah. Menurut kesaksian warga, bahwa dulu anggota Qahhar dari berbagai wilayah seperti Malino, Bone, Palopo berkumpul di Tompo Bulu. Di Tompo Bulu mereka dibekali ilmu-ilmu spiritual seperti belajar mengaji dan belajar salat.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis, bentuk pengajaran yang dilakukan oleh gerombolan masih sebatas memanfaatkan masjid dan rumah warga setempat. Penulis belum menemukan berita di Tompo Bulu bahwa Qahhar ataupun pasukannya mendirikan sekolah sebagaimana yang dituliskan oleh Bahar Battiloe dalam bukunya yang menjelaskan bahwa setelah mendirikan berbagai organisasi untuk menarik simpati rakyat, gerakan Qahhar Mudzakkar juga membangun sekolah. Sekolah ini didirikan di dalam hutan, dengan siswa-siswi yang berasal dari berbagai wilayah.<sup>20</sup>

Keberadaan anggota Qahhar di wilayah Tompo Bulu sangatlah disukai oleh warga sekitar karena keberadaan mereka menjadikan kampung terasa aman (terbebas dari pencurian sapi).<sup>21</sup> Mereka memberlakukan hukum Islam sehingga

---

<sup>17</sup>Abd. Rahman Hamid, *Qahar Muzakkar di Persimpangan Jalan*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2008) h. 29

<sup>18</sup>[https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/tompo\\_bulu\\_1](https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/tompo_bulu_1) diakses online pada tanggal 2 Juli 2022

<sup>19</sup>H. Arsyad, Warga Lokal Desa Tompo Bulu Yang Pernah Menyaksikan Langsung Para Gerombolan Yang Bermarkas Di Tompo Bulu, *Wawancara*, Tompo Bulu, 16 Oktober 2021.

<sup>20</sup>Bahar Mattalioe, *Pemberontakan Menempuh Jalur Kanan* (Jakarta : Grasindo : 1994), h. 195

<sup>21</sup>Supri, Warga Lokal Desa Tompo Bulu, *Wawancara*, Tompo Bulu, 16 Oktober 2021.

membuat jera para pencuri.<sup>22</sup> Selain itu mereka juga aktif terlibat melakukan dakwah Islamiyah kepada masyarakat sekitar dengan mengajar salat dan mengaji.

Di dalam hutan, Qahhar ternyata tidak hanya berperang dan saling tembak menembak dengan anggota TNI. Tapi juga melakukan pembinaan-pembinaan dan membangun wilayah/perkampungan berbasis Islam. Atmosfer religius dari penduduk Tompo Bulu yang merupakan wilayah dakwah Gerombolan Qahhar masih terasa hingga hari ini. Bahkan ada beberapa hal yang masih bisa kita lihat, seperti: hampir seluruh wanita menggunakan hijab, tidak ditemukannya laki-laki dan perempuan yang duduk bercampur-baur di pinggir jalan, larangan pemilik rumah untuk menjemur pakaian di depan rumah dalam rangka memuliakan tamu, dan anjuran untuk merayakan pesta pernikahan hanya di hari jumat.<sup>23</sup>

Beberapa isu yang beredar bahwa gerombolan pasukan Qahhar yang bergerilya di hutan sangatlah dikhawatirkan keberadaannya karena jika terjadi pencurian maka mereka akan memberlakukan hukum Qishos. Menurut Pak Mahmud, salah seorang saksi hidup yang pernah diangkat menjadi guru ngaji gerombolan bahwa pemberlakuan hukum Qishos gerombolan tidaklah dilakukan serta merta; melainkan melalui banyak tahap seperti pembinaan, sosialisasi, dan penerimaan masyarakat terhadap hal tersebut. Jika tidak, maka gerombolan juga tidak serta merta melakukan eksekusi.<sup>24</sup>

Isu beredar lain adalah ketakutan masyarakat terhadap kedatangan gerombolan. Dalam pembahasan ini, penulis sempat mewawancarai seorang nenek yang masih hidup di zaman gerombolan. Beliau menyampaikan bahwa waktu itu, jika gerombolan datang memang ditakutkan tapi sebenarnya ketakutan itu bukan karena gerombolannya tapi jika gerombolan datang maka akan terjadi

<sup>22</sup>Bapak Tande, Warga Desa Tompo Bulu, *Wawancara*, Tompo Bulu, 16 Oktober 2021.

<sup>23</sup>Anjuran menikah hanya di hari jumat saja dilatar belakangi oleh kondisi geografis penduduk Tompo Bulu. Saat itu, mayoritas penduduk di desa Tompo Bulu adalah seorang petani. Karena hari jumat adalah waktu yang mulia maka mayoritas mereka tidak ke sawah di pagi hari jumat, akan tetapi fokus untuk bersiap-siap melaksanakan salat jumat. Sehingga, karena mayoritas mereka tidak ke sawah, maka ada baiknya menikah hanya dilaksanakan pada hari jumat saja.

<sup>24</sup>Pak Mahmud, Warga Desa Tompo Bulu Yang Pernah Ikut Mengajar Para Gerombolan yang buta huruf hijaiyyah dan belum bisa melaksanakan salat dengan benar, *Wawancara*, Tompo Bulu, 16 Oktober 2021.

gencatan senjata dengan pihak TNI (tantara Jawa) yang kadang pelurunya nyasar ke perkampungan warga.<sup>25</sup>

Kekuatan sosial yang dimiliki oleh Gerombolan sebagai gerilyawan di dalam hutan adalah tantangan tersendiri bagi PKI yang sedang mencari dukungan di warga-warga lokal dan pedalaman. Pada suatu hari, PKI pernah datang untuk menawarkan bantuan dan melakukan propaganda di Tompo Bulu. Propaganda yang mereka lakukan adalah meyakinkan masyarakat bahwa PKI akan membebaskan mereka dari penderitaan, sampai mereka merasa bahwa apa yang diperjuangkan oleh PKI memang sepantasnya dilakukan (Arsip Provinsi Sulawesi Reg. 175) Hanya saja bantuan tersebut ditolak lebih awal karena identitas ke-PKI-annya. Menurut keterangan warga lokal, tadinya PKI yang datang mengaku dirinya sebagai perwakilan Nahdatul Ulama (NU), akan tetapi warga lokal mengetahui identitas yang digunakan. Dalam hal ini penulis belum memahami maksud identitas yang digunakan oleh orang PKI berdasarkan keterangan warga setempat.

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh PKI di hutan Sulawesi, bisa dikatakan hampir semua wilayah pedalaman yang menjadi basis kuat Gerombolan Qahhar gagal untuk diajak bergabung. Karena Pendidikan yang didapatkan oleh gerombolan dari Qahhar di tengah hutan sudah memahami persis doktrin komunis yang ditentang dan dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang beragama.

Hal ini juga menjadi respon balik dari kebiasaan PKI yang selalu menjelek-jelekkan para tokoh-tokoh Islam. Mereka berusaha menggait simpati publik di kota dengan melakukan propaganda bahwa pasukan Qahhar adalah pasukan separatis. Sebaliknya, di daerah pedalaman Sulawesi Selatan justru aktivis-aktivis Gerakan DI/TII melakukan propaganda tentang orang-orang Jawa dengan menyebut mereka sebagai orang komunis, kafir atau tidak beragama. “Mereka juga menggunakan istilah “Djawa pendjadjah” dan “Anti Djawa”. (Muzakkar, 1999: 14)

---

<sup>25</sup>Pua' Minna, Warga Kampung Pasui, Salah seorang yang dulu rumahnya rutin dsinggahi oleh para gerombolan untuk makan, *Wawancara*, Pangkep, 16 Oktober 2021.

Dari konfrontasi yang terus terjadi antara PKI dan Ideologi Islam Qahhar yang terus dibawa oleh para gerombolan ke pedalaman hutan dan terus dipropagandakan kepada masyarakat akhirnya berakibat pada kegagalan PKI pada pemilu 1955 di Sulawesi Selatan dan Tenggara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Sainal. 2017. *Andi Selle Dalam Pergolakan Bersenjata Di Sulawesi Selatan 1950-1964*, Yupa: Historical Studies Journal, 1 (1)
- Abu Bakar. 2018. *Konsepsi Ketatanegaraan Kahar Muzakkar*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol 8 No 1.
- Alchaidar. 1999. *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M Kartosuwiryo*, Jakarta: Darul Falah.
- Andi Wanua Tangke. 2009. *Misteri Kahar Muzakkar Masih Hidup*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arsip Provinsi Sulawesi
- Bahar Mattalioe. 1994. *Pemberontakan Menempuh Jalur Kanan*. Jakarta: Grasindo.
- Dijk, C. Van. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti Press
- Gonggong, Anhar. 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jakarta : Grasindo.
- Hamid, Abd. Rahman. 2008. *Qahar Muzakkar di Persimpangan Jalan*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Haryanto. 2014. *Klanisasi Demokrasi, Politik Klan Qahhar Mudzakkar Di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: PolGov
- [https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/tompo\\_bulu\\_1](https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/tompo_bulu_1) diakses online pada tanggal 2 Juli 2022
- Mudzakkar, Abdul Qahhar . 2020. *Revolusi Ketatanegaraan Indonesia Menuju Persaudaraan Manusia*, Makassar: Tim Qahhar Mudzakkar Center
- Muzakkar, Abdul Qahar. 1999. *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Madina Press.
- Nur Aisyah, Patahuddin, H.M Rasyid Ridha. 2018 *Baraka: Basis Pertahanan DI/TII Di Sulawesi Selatan (1953-1956)*, (Jurnal Pattingngalloang: Pemikiran Dan Penelitian Dan Pendidikan Kesejarahan, Vol 5 No 21.
- Nurul Azizah. 2019. *Islamisme: Ideologi Gerakan Kahar Mudzakkar Di Sulawesi Selatan 1952-1965*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol 15 No 2.
- Sitonda, Muhammad Natsir. 2014. *Sejarah Massenrempulu jilid 1*. Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir.
- Taufik Ahmad. 2014. *Mengail Di Air Keruh: Gerakan PKI Di Sulawesi Selatan 1950-1965*. Jurnal Patanjala, Vol 6 No 2.
- Usman, Syafaruddin. 2009. *Tragedi Patriot Dan Pemberontak Kahar Muzakkar*,

Yogyakarta: Penerbit Narasi

Wawancara dengan Bapak Tande, Warga Desa Tompo Bulu Yang Pernah Ikut Mengajar Para Gerombolan yang buta haruf hijaiyyah dan belum bisa melaksanakan salat dengan benar, Tompo Bulu, 16 Oktober 2021.

Wawancara dengan H. Arsyad, Warga Desa Tompo Bulu Yang Pernah Menyaksikan Langsung Para Gerombolan Yang Bermarkas Di Tompo Bulu, Tompo Bulu, 16 Oktober 2021.

Wawancara dengan Hasan Kamal, Anak tertua Qahhar Muzakkar dari istrinya Corry (anak tertua yang pernah melihat langsung dan hidup di tengah hutan bersama para gerilyawan), Hotel Lopi Makassar, 21 November 2021.

Wawancara dengan Mahmud, Warga Desa Tompo Bulu Yang Pernah Ikut Mengajar Para Gerombolan yang buta haruf hijaiyyah dan belum bisa melaksanakan salat dengan benar, Tompo Bulu, 16 Oktober 2021.

Wawancara dengan Minna, Warga Kampung Pasui, Salah seorang yang dulu rumahnya rutin dsinggahi oleh para gerombolan untuk makan, Pangkep, 16 Oktober 2021.

Wawancara dengan Supri, Tompo Bulu, 16 Oktober 2021.